

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

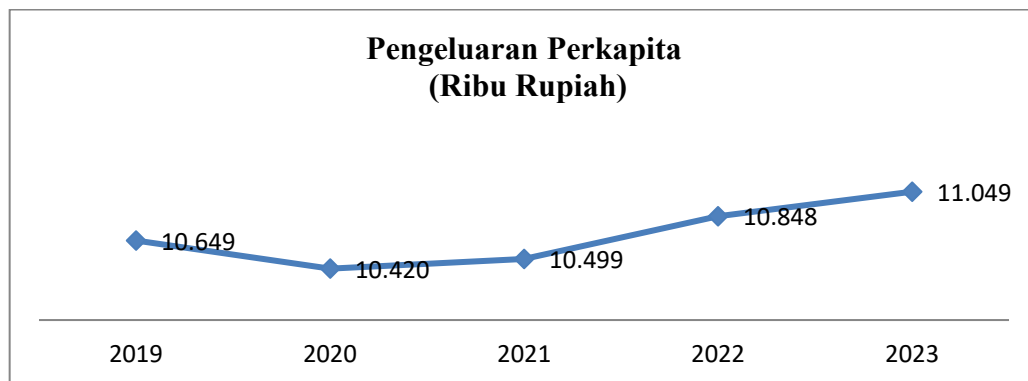
Indonesia sebagai negara masih perkembangan dengan 38 provinsi dengan beragam keanekaragaman yang ada. Keunikan pada setiap provinsinya menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya dan bahasa yang menjadi ciri khas pada setiap daerahnya.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dimana mempunyai keistimewaaan juga sebuah salah satu provinsi yang mempunyai sektor pertanian terutama perkebunan sebagai salah satu penopang utama perekonomian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Komoditas utama yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan teh. Pendapatan dari sektor ini turut mempengaruhi pengeluaran perkapita masyarakat. Tingginya pendapatan dari komoditas perkebunan berpotensi meningkatkan konsumsi rumah tangga, namun juga sangat rentan terhadap gejolak harga (inflasi) komoditas dan kondisi pasar global.

Provinsi Sumatera Utara juga didukung oleh kondisi lokal dimana terdapat kekayaan alam yang dimiliki misal: minyak bumi, belerang, batu bara, emas dan sebagainya yang merupakan hasil tambang. Pengeluaran perkapita bertujuan untuk memantau daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Pengeluaran perkapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia, karena realisasi pengetahuan dalam menentukan berbagai kegiatan produktif yang akan menghasilkan output berupa pendapatan. Pendapatan yang ada

menciptakan pengeluaran atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa memenuhi kebutuhan sehari bagi anggota rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing Power Parity) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah (Herman, 2023). Konsumsi rumah tangga berarti semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh keluarga guna membeli barang/jasa yang dibutuhkan sehari-hari, dalam kurun waktu tertentu.

Setiap orang dan keluarga pasti punya kebutuhan, baik yang sifatnya rohani seperti ketenangan batin maupun kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Cepat atau lambat, semua kebutuhan itu pasti akan diusahakan untuk dipenuhi. Guna bisa memenuhi semuanya, dibutuhkan suasana yang adil, makmur, dan stabil. Di sinilah peran pemerintah jadi penting, sebab pemerintah membantu masyarakat supaya bisa hidup sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dibutuhkan bukan cuma barang/jasa, tapi juga uang untuk memenuhi berbagai keperluan. Adapun data pengeluaran perkapita di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019- 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



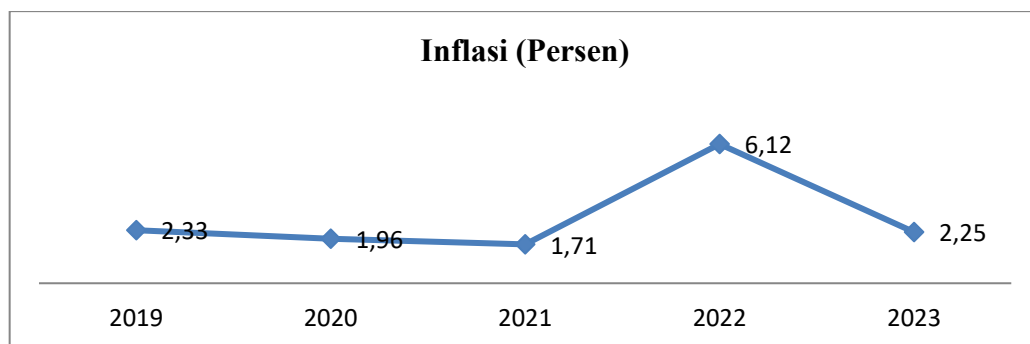
*Sumber: Badan Pusat Statistika Sumatera Utara 2019-2023*

**Gambar 1. 1**  
**Grafik Pengeluaran Perkapita Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023**

Gambar 1.1 pengeluaran per kapita di Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita mencapai Rp10.649.000, namun turun menjadi Rp10.420.000 pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID -19 yang mengganggu perekonomian. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita meningkat menjadi Rp10.499.000, menunjukkan awal pemulihan ekonomi setelah penurunan signifikan. Tren yang baik dengan pengeluaran per kapita mencapai Rp11.049.000 pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Kebijakan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi dan mendukung sektor-sektor tertentu juga dapat berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita. Kegiatan ini dapat mempengaruhi pengeluaran per kapita jika penerapan teknologi dan efisiensi produksi meningkat. Perubahan tahunan pada pengeluaran per kapita di Sumatera Utara dipengaruhi oleh kombinasi faktor inflasi, hubungan antara pendapatan dan konsumsi, kondisi ekonomi makro, intervensi pemerintah, dan dampak bencana alam.

Kenaikan biaya hidup dari tahun ke tahun di Sumatera Utara turut berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi. Inflasi itu kondisi ketika harga-harga barang/jasa secara umum terus mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, tingkat inflasi di Sumatera Utara bisa dijadikan sebagai indikator guna menilai kondisi perekonomian daerah tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah atau kebijakan yang tepat guna mengendalikan inflasi, sebab inflasi yang terlalu tinggi bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Saat pertumbuhan ekonomi melambat, maka pengeluaran/kapita masyarakat cenderung ikut naik. Gambaran mengenai hal ini bisa dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



*Sumber: Badan Pusat Statistika Sumatera Utara 2019-2023*

**Gambar 1. 2**  
**Laju Inflasi Sumatera Utara Tahun 2019-2023**

Berdasarkan gambar 1.2 persentase inflasi di Sumatera Utara mengalami fluktuasi tahunan. Pada tahun 2019, inflasi tercatat sebesar 2,33%, dengan tantangan besar dalam pengendalian inflasi, Bank Indonesia menyebutkan inflasi tertinggi terutama akibat lonjakan harga cabai merah yang mencapai 1,63% pada bulan Juni. Meskipun inflasi di Sumatera Utara masih di bawah target nasional sebesar 2,72persen, pada tahun 2020 inflasi sempat turun jadi 1,96persen sebab hubungan pandemi COVID-19. Tahun berikutnya, yakni 2021, inflasi turun lagi

jadi 1,71persen. Tapi di tahun 2022, inflasi naik cukup tajam sampai 6,12persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai hal dari luar negeri, seperti konflik antar negara, gangguan pasokan barang, dan naiknya harga barang penting seperti bensin, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Lalu, di tahun 2023, inflasi mulai turun lagi dan kembali ke angka yang kecil dibanding tahun sebelum itu.

Jadi, inflasi dan pengeluaran per kapita di Sumatera Utara dari tahun 2019 ke 2020 menunjukkan penurunan. Inflasi turun dari 2,33persen di tahun 2019 jadi 1,96persen di tahun 2020. Meskipun inflasi menurun, pengeluaran perkapita justru menurun dari 10.649 ribu rupiah menjadi 10.420 ribu rupiah. Maka pada tahun 2020, meskipun angka partisipasi sekolah meningkat dari 77.67 menjadi 78.21 persen, pengeluaran perkapita justru menurun dari 10.649 ribu rupiah menjadi 10.420 ribu rupiah.

Pada data tahun 2022, Sumatera Utara mengalami kenaikan inflasi signifikan dari 1,71% (2021) menjadi 6,12% sementara pengeluaran perkapita meningkat dari 10.499 ribu rupiah menjadi 10.848 ribu rupiah, ini menunjukkan bahwa meskipun harga-harga barang dan jasa mengalami kenaikan cukup tinggi masyarakat tetap meningkatkan konsumsi. Berdasarkan BPS peningkatan inflasi pada 2022 di Sumatera Utara di dorong naiknya harga barang dan jasa yang meningkatkan pengeluaran perkapita. Selain itu, pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi menyebabkan masyarakat mulai kembali berbelanja dan mengkonsumsi lebih banyak, meskipun harga barang lebih tinggi.

Menurut teori Kuznets, salah satu ciri dari pertumbuhan ekonomi yang maju itu bisa dilihat dari tingginya output/kapita, atau hasil produksi/orang. Kalau

pertumbuhan ekonomi makin tinggi, otomatis output per kapitanya juga naik. Hal ini nantinya bisa mengubah pola konsumsi masyarakat misalnya, dari yang awalnya lebih banyak konsumsi barang kebutuhan pokok, jadi mulai konsumsi barang sekunder atau tersier. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat juga bisa mendorong naiknya (IPM). (Kuznets dalam Pardede)

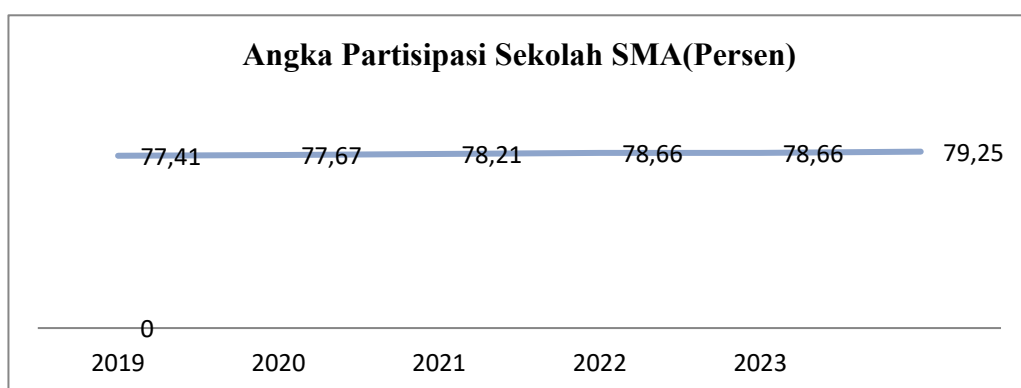
Inflasi bikin harga-harga barang jadi naik, dan itu bisa bikin daya beli masyarakat turun, yang akhirnya juga mengurangi tingkat konsumsi mereka. Kenaikan harga yang terjadi terus-menerus ini bikin orang makin sulit buat beli barang/jasa, dan inilah yang disebut inflasi, fenomena yang umum terjadi dan berlangsung terus-menerus. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bisa ambil berbagai langkah buat mengendalikan laju inflasi (Manullang et al., 2024). Di sisi lain, pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi bagi tiap orang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya kesejahteraannya juga makin baik. Hal ini nantinya bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi negara dalam jangka panjang (Nizar & Arif, 2023).

Kalau sistem pendidikan berjalan dengan baik, harapannya bisa melahirkan lulusan atau SDM yang profesional dan mampu bersaing di tingkat internasional, sejajar dengan negara-negara berkembang lainnya (Mahendra dkk, 2019: 187). Di zaman sekarang yang serba mendunia, pendidikan yang berkualitas itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi keharusan. Globalisasian yang ditandai dengan persaingan besar-besaran di berbagai bidang membuat kita tidak bisa santai. Akibatnya, lembaga pendidikan di Indonesia punya tanggung jawab besar guna mencetak lulusan yang benar-benar punya kemampuan dan siap menghadapi persaingan dunia (Wiyani, 2011: 205). Inflasi yang lebih tinggi dari rata-rata di negara

berkembang dapat menyebabkan kenaikan kesenjangan pendapatan. Inflasi ialah kenaikan umum dalam biaya barang/jasa. Hal ini bisa memiliki berbagai efek pada kelompok pendapatan yang berbeda, yang menyebabkan perbedaan dalam dayabeli dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi bisa menyebabkan ketidakpastian ekonomi, yang bisa secara tidak proporsional mempengaruhi individu dengan penghasilan yang lebih rendah sebab orang-orang ini kurang cocok untuk menahan guncangan keuangan.

Mungkin sulit bagi mereka untuk merencanakan masa depan dan melakukan investasi pada diri mereka sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, dan kemajuan ekonomi mereka. Penelitian ini juga mendukung argumen yang diberikan di atas dan mengungkapkan hubungan positif antara inflasi dan ketimpangan pendapatan (Berisha et al., 2023).

Secara umum, ada anggapan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin baik pula kualitas dirinya, baik dari cara berpikir maupun cara bertindak (Statistik, 2024). Hal ini bisa dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini



*Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2019-2023*

**Gambar 1. 3**  
**Angka Partisipasi Sekolah SMA Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2019- 2023**

Pada Gambar 1.3 diatas memperlihatkan (APS) di tingkat (SMA) di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, dimulai dari 77.67 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 79.25 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan melalui program beasiswa, perbaikan infrastruktur, dan kesadaran pendidikan. Meskipun terjadi penurunan kecil pada tahun 2022, di mana APS tetap di angka 78.66, hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19.

Namun, rencana pembelajaran daring dan dukungan masyarakat berkontribusi pada pemulihan dan peningkatan partisipasi siswa di tahun 2023. Secara keseluruhan, fenomena ini mencerminkan kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan di Sumatera Utara, serta komitmen untuk meningkatkan pendidikan bagi generasi muda. Masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan, dan mungkin juga ada kebijakan pemerintah yang mendukung hal ini. Dengan waktu sekolah yang lebih lama, kita harap nilai-nilai pendidikan juga meningkat. Pemerintah paling banyak mengeluarkan anggaran pendidikan di bidang pendidikan tinggi. Dana ini biasanya dipakai guna mendukung beasiswa, menyediakan fasilitas belajar, membiayai kegiatan studi, dan berbagai kebutuhan lainnya yang mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Namun pada tahun 2020 terjadi fenomena dimana angka partisipasi sekolah SMA meningkat dari tahun 77.67 menjadi 78.21 persen, tetapi pengeluaran per kapita justru menurun dari 10.649 ribu rupiah menjadi 10.420 ribu rupiah. Menurut (BPS) Turunnya pendapatan rumah tangga akibat (PHK) dan berkurangnya jam

kerja, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, dan penurunan konsumsi rumah tangga, terutama pada sektor non-pokok. Sementara itu, angka partisipasi sekolah tetap meningkat karena adanya kebijakan pembelajaran daring (online learning) dan akses pendidikan meskipun dalam situasi krisis. Makin tinggi angka partisipasi sekolah, artinya semakin banyak orang yang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Umumnya, ada anggapan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin baik pula kualitas dirinya, baik dari cara berpikir maupun dalam bertindak.

Menurut Todaro (2015), teori modal manusia menjelaskan bahwa seseorang bisa berinvestasi supaya kehidupannya di masa depan lebih baik, khususnya agar bisa meningkatkan konsumsi atau kesejahteraannya nanti. Bentuk investasi yang dimaksud disini adalah pendidikan dan kesehatan. Dimana pendidikan yang tinggi mempengaruhi pola pikir dan keputusan dalam pengambilan keputusan seseorang yang lebih baik dan kesehatan mempengaruhi aktivitas seseorang dalam menaikkan produktivitas. Diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan mempunyai pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.

Program wajib belajar itu, bentuk usaha pemerintah guna meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) tentang wajib belajar. Ada banyak alasan kenapa masih ada anak-anak yang putus sekolah. Beberapa penyebab utamanya antara lain, kondisi ekonomi keluarga yang sulit, kurangnya perhatian dari orangtua, fasilitas belajar

yang belum memadai, rendahnya minat anak untuk sekolah, pengaruh budaya sekitar, dan juga lokasi sekolah yang terlalu jauh (Dewi et al., 2014).

Penghasilan keluarga punya hubungan yang erat dengan keputusan anak untuk berhenti sekolah. Sebab itu, disarankan agar pemerintah lebih mengoptimalkan bantuan pendidikan, seperti beasiswa atau bantuan biaya sekolah lainnya (Asmara & Sukadana, 2016). Kapasitas pendidikan juga punya peran penting dalam menaikkan kualitas dan efisiensi SDM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Harsono, 2024). Sebab itu, studi ini penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan guna kebijakan yang bertujuan memperluas akses dan menaikkan kualitas pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Harapannya, studi ini bisa memberikan rekomendasi yang berbasis data dan fakta, agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan yang lebih terarah, kesenjangan pendidikan bisa dikurangi. Hal ini tentu bisa menciptakan SDM yang lebih berkualitas dan mampu bersaing, sehingga mendukung pembangunan nasional yang adil dan merata. Apalagi di tengah kondisi inflasi yang tinggi, daya beli masyarakat ikut turun, dan hal ini bisa membuat lebih banyak anak terpaksa putus sekolah sebab harus membantu ekonomi keluarga.

Dan Sumatera Utara memiliki berbagai macam sektor ekonomi yang beragam mulai dari pertanian, perkebunan, industri hingga jasa, maka dari itu dapat memberikan peluang untuk mempelajari bagaimana sektor tersebut berkontribusi terhadap ekonomi, seperti pengeluaran perkapita dan inflasi. Sejauh ini telah dilakukan beberapa penelitian mengenai inflasi, pendidikan dan pengeluaran

perkapita. Dan penelitian yang berhubungan dengan inflasi dan konsumsi rumah tangga seperti yang dilakukan oleh (Soleh et al., 2023) inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap jumlah konsumsi yang dikeluarkan rumah tangga. Penelitian yang dilakukan Ningtias (2021) tingkat pendidikan dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan dalam penelitian ini pada penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten/kota dan tahun penelitian yang berbeda. Berdasarkan pembahasan diatas penulis tertarik untuk meneliti di antara inflasi dan pendidikan terhadap pengeluaran perkapita sehingga melatar belakang penulis untuk mengambil judul **“Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengeluaran Perkapita Di Sumatera Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan atau rumusan masalah dalam studi ini yakni sebagai berikut.

1. Seberapa besar hubungan inflasi terhadap pengeluaran perkapita di Sumatera Utara?
2. Seberapa besar hubungan tingkat pendidikan terhadap pengeluaran perkapita di Sumatera Utara?
3. Seberapa besar hubungan inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pengeluaran perkapita di Sumatera Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian pada bagian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari studi ini sebagai berikut.

1. Mengetahui hubungan inflasi terhadap pengeluaran perkapita di Sumatera Utara.
2. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan terhadap pengeluaran perkapita di Sumatera Utara.
3. Mengetahui hubungan inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pengeluaran perkapita di Sumatera Utara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari studi ini diinginkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil studi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis lain sebagai sumber informasi dan dasar pertimbangan dalam mengkaji lebih lanjut hubungan antara inflasi, tingkat pendidikan, dan pengeluaran perkapita.
2. Bagi pemerintah, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dan inflasi terhadap pengeluaran/perkapita sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari hasil studi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, di Sumatera Utara diharapkan penelitian ini sebagai bahan informasi dan bagi pemerintah saat menyusun strategi atau kebijakan dalam inflasi, pendidikan dan pengeluaran perkapita.
2. Bagi Bank Indonesia/BI hasil studi ini diharapkan bisa dipakai guna merumuskan kebijakan yang tepat dan Bank Indonesia perlu terus menjaga kestabilan harga melalui kebijakan moneter dan fiskal dalam pengendalian inflasi yang efektif akan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.